

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Selasa, 4 September 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (Halaman, 9)	Selasa, 4 September 2018	Tim Teknis Dampingi Warga Lombok Membangun Rumah	Kementerian PUPR menyiapkan tim untuk membantu warga memperbaiki rumah yang rusak terkena gempa di Lombok.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)	Selasa, 4 September 2018	3 BUMN Berebut Proyek Rp 1,94 Triliun	Setelah sempat mengalami perubahan penetapan pengumuman pemenang prakualifikasi, proses lelang Bendungan Sadawarna akhirnya menghasilkan nama-nama peserta yang lulus ke tahap berikutnya.
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)	Selasa, 4 September 2018	Peruntukan Wisma Atlet Belum Jelas	Pemerintah hingga kini belum memutuskan peruntukan wisma atlet usai penyelenggaraan Asian Games dan Asian Paragames 2018

Judul	Tim Teknis Dampingi Warga Lombok Membangun Rumah	Tanggal	Selasa, 4 September 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 9)		
Resume	Kementerian PUPR menyiapkan tim untuk membantu warga memperbaiki rumah yang rusak terkena gempa di Lombok.		

Tim Teknis Dampingi Warga Lombok Membangun Rumah

NRD/BIRD PERS SETPRES



Presiden Joko Widodo meninjau langsung perbaikan SMP 6 Mataram, salah satu sekolah yang terkena dampak gempa, kemarin.

Warga dibebaskan memilih material bangunan.

Efri Ritonga
ucok_r@tempo.co.id

MATARAM — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan tim untuk membantu warga memperbaiki rumah yang rusak terkena gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sepanjang Juli-Agustus lalu. Menteri

Pekerjaan Umum Basoeki Hadimoeljono mengatakan pendampingan dilakukan agar rumah yang dibangun sesuai dengan keinginan masyarakat tapi tetap tahan gempa.

"Didampingi terus, gambar-gambar juga kami sampaikan untuk dipilih. Mudah-mudahan bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat," ujar Basoeki,

kemarin. Ia mengimbuhkan, satu tim akan berisi sembilan personel yang terdiri atas pegawai Kementerian Pekerjaan Umum, mahasiswa, dan anggota TNI. Satu tim ditargetkan mengawasi perbaikan 100-150 rumah.

Menurut Basoeki, pembangunan rumah rusak akan dikerjakan dengan sistem rekompak (rehabilitasi konstruksi berbasis kepada masyarakat). Ia menuturkan, sistem ini pernah digunakan dalam perbaikan rumah rusak saat bencana erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta. "Supaya lebih cepat, masyarakat tidak menonton, juga ikut bekerja. Itu mekanisme," ucapnya.

Basoeki mengungkapkan, tim pendamping juga akan mengarahkan masyarakat agar membangun rumah dengan sistem rumah instan sederhana sehat (risha) yang tahan gempa. "Syaratnya satu, bangun rumah tahan gempa. Mau pakai kayu, mau pakai apa tak masalah, tapi strukturnya harus tahan gempa," tuturnya.

Pemilihan material bangunan menjadi perhatian karena banyak warga yang trauma membangun hunian dengan bahan batu bata atau batako. "Saat dialog antara Presiden dan masyarakat pada Ahad lalu, ada warga yang bertanya bagaimana kalau mereka membangun rumah bukan dengan batu bata atau batako," ucap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei.

Presiden Joko Widodo berharap perbaikan rumah rusak di Lombok bisa diselesaikan sebelum musim hujan tiba. "Kita berkejaran dengan waktu karena sebentar lagi musim hujan datang," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam apel Siap Siaga NTB Bangun Kembali di Lombok, kemarin. Presiden juga meminta para relawan siap sedia membantu masyarakat dalam proses perbaikan. "Saya titip ke saudara semuanya agar masyarakat dibantu dalam pembersihan dan pembangunan kem-

bali," katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan ada 78 ribu rumah yang rusak akibat gempa Lombok. Menteri Basoeki menuturkan, jumlah pastinya akan diketahui setelah verifikasi terhadap semua rumah warga yang terkena dampak selesai dilakukan. "Dari 78 ribu itu diverifikasi terhadap semua yang rusak berat, ringan, dan sedang," ucapnya.

Tempo mengamati, puluhan anggota TNI bersama masyarakat mulai membersihkan dan membangun kembali rumah warga di pusat Kota Pemenang hingga ke Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Komandan Satuan Tugas Gempa Lombok, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, optimistis pembersihan rumah dapat selesai sebelum musim hujan tiba. "(Pembersihan) fasilitas publik, seperti pasar, puskesmas, sekolah, masjid, atau musala, sudah mulai dikerjakan," kata Rizal.

● SIFUL HADI | AKHISA M. NUR (LOMBOK)

Judul	3 BUMN Berebut Proyek Rp 1,94 Triliun	Tanggal	Selasa, 4 September 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)		
Resume	Setelah sempat mengalami perubahan penetapan pengumuman pemenang prakualifikasi, proses lelang Bendungan Sadawarna akhirnya menghasilkan nama-nama peserta yang lulus ke tahap berikutnya.		

► BENDUNGAN SADAWARNA

3 BUMN Berebut Proyek Rp1,94 Triliun



JAKARTA — Setelah sempat mengalami perubahan penetapan pengumuman pemenang prakualifikasi, proses lelang Bendungan Sadawarna akhirnya menghasilkan nama-nama peserta yang lulus ke tahap berikutnya.

Perkuat Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Air

Bendungan Sadawarna yang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat merupakan satu dari delapan bendungan yang lelangnya sudah dimulai pada tahun ini. Tujuh bendungan lainnya yaitu Tigadihaji di Sumsel, Randugunting di Jabar, Bener dan Jlantah di Jateng, Sidan di Bali, Beringin Sila dan Meninting di NTB.

Keberadaan Bendungan Sadawarna diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan sumber daya air di daerah tersebut.

Profil Bendungan Sadawarna

Lokasi : Kabupaten Subang, Jawa Barat
 Nilai investasi (sesuai dengan HPS): Rp1,94 triliun (2 paket)

Lulus prakualifikasi:

- PT Brantas Abipraya (Persero)
- PT Nindya Karya (Persero) Wilayah VI
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
- Target tanda tangan kontrak: Oktober–November 2018
- Target operasi: 2021

Sumber: LPSE, KPPIP, diolah

BISNIS/TUTUN PURNAMA

Irene Agustine
 irene.agustine@bisnis.com

Tiga kontraktor BUMN dipas-tikan lulus ke tahap selanjutnya pada proyek pembangunan bendungan yang berada di Jawa Barat itu dengan total nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp1,94 triliun.

Sebagaimana dilansir dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan bendungan di Kabupaten Subang itu dan terdiri atas dua paket dengan rincian paket pertama memiliki nilai HPS Rp1 triliun dan paket kedua Rp940,81 miliar.

Dari prakualifikasi lelang untuk dua paket tersebut, sebanyak tiga BUMN lulus pada kedua paket itu. BUMN tersebut yakni PT Brantas Abipraya (Persero), PT Nindya Karya (Persero) Wilayah VI, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pada paket pertama, ketiga BUMN tersebut mengalahkan 91 peserta lelang. Pada paket kedua, ketiga BUMN tersebut menyisihkan 84 peserta.

► Pengumuman hasil prakualifikasi mundur dari jadwal yang sebelumnya ditentukan pada 6 Agustus–16 Agustus menjadi 31 Agustus 2018.

Dalam LPSE disebutkan bahwa syarat kualifikasi pada paket I dan II salah satunya adalah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUK) atau yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi saluran air, pelabuhan, dam, dan prasarana sumber air lainnya.

Ketiga pemenang dalam dua paket tersebut tengah dalam proses pengunduhan dokumen pemilihan.

Adapun, pengumuman hasil prakualifikasi tersebut mundur dari jadwal yang sebelumnya ditentukan pada 6 Agustus–16 Agustus menjadi pada 31 Agustus 2018.

Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa baru diketahuinya pemenang prakualifikasi bendungan tersebut pada akhir Agustus berpotensi memundurkan jadwal kontrak pembangunan bendungan yang sebelumnya ditargetkan dilakukan pada awal Oktober 2018.

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa target kontrak akan tetap dilakukan pada tahun ini.

Anggaran pembangunan Bendungan Sadawarna bersifat kontrak tahun jamak dan masuk dalam anggaran untuk didanai mulai dari APBN tahun ini.

"Agak mundur, tapi tetap tahun ini target kontrak," kata Sumiarsih kepada *Bisnis*, Senin (3/8).

Sebagaimana dikutip dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Bendungan Sadawarna direncanakan memiliki kapasitas

sebesar 49 juta meter kubik dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 6.000 ha.

Selain itu, bendungan tersebut diharapkan dapat mengurangi debit banjir hingga 316 meter kubik per detik dan menyediakan pasokan bahan baku sebesar 0,50 meter kubik per detik. Rencananya, bendungan tersebut beroperasi pada 2021.

KONTRAK LAIN

Sementara itu, tiga kontrak tiga bendungan yang seharusnya dilakukan pada tahun lalu, katanya, yakni Tigadihaji di Sumatra Selatan, Bener di Jawa Tengah, dan Sidan di Bali masih menunggu revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dalam anggaran 2018.

Ketiga bendungan itu sebelumnya masuk dalam pembangunan bendungan tahun jamak pada 2017. Ketiganya baru bisa dilelang pada tahun ini karena sebelumnya sempat ditawarkan kepada investor untuk skema kerja sama pemerintah dengan

badan usaha (KPBU), tetapi akhirnya batal.

"Kontrak masih menunggu revisi DIPA," kata Sumiarsih.

Direktur Operasi I PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Budi Sad-dewa Soediro menuturkan bahwa perseroan ikut serta dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai anggota dari operasi bersama (*joint operation/JO*) dengan PT Brantas Abipraya.

Dalam lelang bendungan tersebut, Brantas memenangi paket I dengan HPS Rp606,77 miliar dan harga terkoreksi Rp593,01 miliar, serta paket IV dengan HPS Rp1,40 triliun dan harga terkoreksi Rp1,37 triliun.

"Kami sebagai anggota dalam JO bersama Brantas untuk Bendungan Bener. Saat ini masih menunggu proses tanda tangan kontrak," kata Budi kepada *Bisnis*, akhir pekan lalu.

Bendungan Bener terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan direncanakan memiliki kapasitas 100,94 juta meter kubik. □

Judul	Peruntukan Wisma Atlet Belum Jelas	Tanggal	Selasa, 4 September 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)		
Resume	Pemerintah hingga kini belum memutuskan peruntukan wisma atlet usai penyelenggaraan Asian Games dan Asian Paragames 2018		

► ASIAN GAMES

Peruntukan Wisma Atlet Belum Jelas

JAKARTA — Pemerintah hingga kini belum memutuskan peruntukan Wisma Atlet usai penyelenggaraan Asian Games dan Asian Paragames 2018.

Menurut Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH, penetapan bangunan vertikal tersebut baru akan dilakukan setelah olahraga bagi penyandang disabilitas se-Asia, Asian Para Games 2018 rampung digelar pada Oktober.

Selain itu, jika memang peruntukannya berubah, maka tetap akan dilakukan pembicaraan oleh Kementerian Sekretaris Negara selaku pemilik lahan.

Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, diatur peruntukan Wisma Atlet pascaseluruh kegiatan olah raga berakhir, yaitu sebagai rumah susun sewa (rusunawa).

“Belum ada pembicaraan dan belum ditentukan. Nantinya akan ditentukan dengan rapat oleh Sekretariat Negara dengan yang lainnya. Kan masih

ada Paragames dulu, doakan juga supaya sukses penyelenggaraannya,” katanya kepada *Bisnis* Senin (3/9).

Direktur Media dan Public Relation Inasgoc Danny Buldansyah sebelumnya mengatakan pengelolaan Wisma Atlet Kemayoran dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran di bawah Sekretariat Negara (Setneg).

Inasgoc akan melakukan serah terima kepada PPK Kemayoran sebelum Inasgoc selaku panitia pelaksana Asian Para Games mengambil alih Wisma Atlet Kemayoran. Setelahnya, kemungkinan Wisma Atlet akan dijual sesuai dengan tipenya, apakah rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

“Nanti setelah itu akan dijual, jadi ada yang rusunami ada yang rusunawa,” katanya.

Di sisi lain, Kementerian PUPR berharap Wisma Atlet bisa dipergunakan untuk pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian PUPR sebagai rusun sewa. *(Anitana W. Puspa)*